



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SUB UNIT KERJA : BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUH. YAHYA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 508652

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.250.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 260 m2/200 m2 di KOTA MATARAM ,
HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 175.000.000

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 160.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL
SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 35.000.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 151.519.622

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.611.519.622

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.611.519.622

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **31 Agustus 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.